

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam era global menuntut berbagai perubahan pendidikan yang bersifat mendasar. Menurut Mulyasa (2013:2), “perubahan itu menyangkut perubahan masyarakat dari lokal menjadi global, dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, pertumbuhan ekonomi ke perkembangan manusia”. Dalam rangka mengantisipasi perubahan global dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin canggih dan pemerataan layanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus. Bukti dari keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan tujuan pendidikan ditandai dengan keluarnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pusat. Dalam setiap kebijakan pemerintah ini memang harus diikuti dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sejalan mendukung akan kebijakan pendidikan nasional yang diselaraskan dengan keadaan nyata dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, strategi pendidikan nasional harus mempunyai tujuan yang jelas, layak dan dicapai dengan kemampuan yang ada serta memiliki gambaran ideal tentang tujuan pendidikan yang diharapkan di masa depan.

Hidayat (2013:5) menjelaskan ada lima permasalahan yang harus dipecahkan dalam pendidikan nasional antara lain:

1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan menerapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada penataan kurikulum berbasis kompetensi dan berkarakter.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, dengan pendekatan partisipatif.
4. Pemerataan layanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan pembiayaan yang adil dan transparan, pemerataan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan.
5. Pendidikan berkarakter untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai filosofis dan mengembangkan seluruh karakter bangsa dalam berbagai jenis.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, membutuhkan perubahan yang mendasar berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum di Indonesia sudah lama dipakai dalam bidang pendidikan, istilah ini muncul pada tahun 1855 kemudian terus berkembang seiring dengan perkembangan berbagai hal yang harus dicapai.

Menurut kebijakan pendidikan nasional pengertian kurikulum dapat dilihat dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (9),

kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum tidak hanya dibelajarkan kepada peserta didik, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Kurikulum dalam sistem pendidikan nasional mempunyai kedudukan sentral dan strategis. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Dalam konteks kebijakan nasional perubahan kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan berbagai pihak, bahkan dalam pelaksanaannya seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan semata. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya, maupun peserta didik akan menerima imbasnya dari perubahan kurikulum yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap perubahan yang terjadi akan muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik pro maupun kontra. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan pada. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan

iptek. Hamalik sebagaimana dalam Hidayat (2013:1) mengemukakan bahwa dalam perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tujuan filsafat pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan.
2. Sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
3. Keadaan lingkungan interpersonal, kultural, biokologi dan geokologi.
4. Kebutuhan pembangunan Poleksosbudhankam.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa.

Kurikulum mempunyai sifat dinamis, sehingga seringkali harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, proses perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Proses perubahan tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Perubahan dan tuntutan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional harus mengacu pada landasan yuridis Pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, pemerintah mencanangkan perlu diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dapat membekali peserta didik dengan kemampuan dan sikap serta mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Hal tersebut diperjelas dalam penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2003 bagian umum juga ditegaskan bahwa, salah satu strategi

pembangunan pendidikan nasional adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini diharapkan mampu memecahkan berbagai masalah utamanya masalah pendidikan, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan untuk perbaikan kurikulum dengan pengembangan di berbagai jenjang pendidikan melalui kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perkembangan dari kurikulum 2006 atau KTSP yang sudah memasuki usia ke-7 tahun. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi pendidikan. Menurut Hidayat (2013:113), “orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), ketrampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*)”. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 35 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kurikulum 2013 menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi dengan nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 menurut Mulyasa (2013:7) bertujuan sebagai berikut:

Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.

Dalam mengimplementasi kurikulum 2013 mencakup seluruh pembelajaran pada semua bidang studi yang nantinya akan dikembangkan, terutama norma dan nilai yang akan dihubungkan dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013

berbasis karakter dan kompetensi melibatkan semua komponen pendidikan yang utamanya ada dalam sistem pendidikan itu sendiri. Menurut Mulyasa (2013:9), “komponen itu adalah kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, model penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan sekolah, pengembangan diri, sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja”. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana kurikulum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya guru begitu juga sebaliknya, guru tidak akan bisa melaksanakan proses pembelajaran tanpa adanya kurikulum. Maka dari itu guru mempunyai peran yang begitu mendasar dalam implementasi kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 merupakan pembaharuan dengan karakter dan kompetensinya. Proses implementasi ini menuntut guru untuk lebih profesional meskipun sebelum diimplementasikan pihak pemerintah mengadakan program pelatihan guru *master teacher* (guru inti) yang direkrut dari guru-guru berprestasi dengan melihat skor ujian kompetensi awal (UKA), ujian kompetensi guru, diklat pasca UKA, PLPG, diakhiri dengan penilaian acuan patokan dan penilaian berbasis kompetensi. Meskipun demikian, kegiatan ini hanya tertuju pada guru yang berprestasi mencakup sebagian bukan keseluruhan guru. Pemahaman hanya tertuju pada guru yang sudah mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) dan mendapatkan pengarahan, tetapi bagi guru yang belum mengikuti diklat merupakan masalah besar dan akan menghambat dalam implementasi kurikulum 2013.

Pencapaian tujuan kurikulum 2013 merupakan tugas semua komponen pendidikan, namun guru sebagai pelaksana lapangan dilimpahi tanggung jawab besar dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 berbasis karakter erat kaitannya dengan pembelajaran PPKn yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkarakter kuat, yang harapannya bisa memecahkan permasalahan bangsa dan mencapai tujuan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa, guru PPKn mempunyai peran sangat penting dalam penanaman karakter pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Guru PPKn yang lebih paham akan pengembangan karakter harus membantu guru lain dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter, karena dalam implementasi kurikulum 2013 membutuhkan kesiapan serta kemampuan keprofesionalan guru dalam pelaksanaannya.

Kesiapan dalam implementasi kurikulum 2013 menyangkut kemampuan dan rasionalitas dari berbagai sudut pandang utamanya untuk pengembangan kurikulum 2013. Kemampuan dan rasionalitas yang perlu dipahami oleh guru utamanya dalam proses pembelajaran adalah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Proses pembelajaran yang menuntut kesiapan guru dalam perencanaan, pelaksanaan pengembangannya dan pemahaman macam model penilaian yang akan menjadi sebuah umpan balik agar dapat menyempurnakan proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Pemahaman rangkaian proses pembelajaran dan model penilaian merupakan satu rangkaian yang utuh yang perlu disiapkan guru dalam menerima kurikulum 2013. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan

dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaruh pemahaman tentang Proses Pembelajaran dan Model Penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada Guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Mulyasa (2013:9), dalam proses implementasi kurikulum 2013 ada beberapa komponen yang harus disiapkan yaitu, “kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, model penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan sekolah, pengembangan diri, sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja”. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh pemahaman tentang Proses Pembelajaran dan Model Penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada Guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014”.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas sangat luas, sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Adapun ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian, meliputi:

- a. Proses Pembelajaran.
- b. Model Penilaian.
- c. Kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada Guru di SMA Negeri 1 Polanharjo.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah semua anggota Guru SMA Negeri 1 Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2014 yang keseluruhan berjumlah 63 orang.

D. Perumusan Masalah

Sugiyono (2011:55) menyatakan bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang proses pembelajaran terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang model penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang proses pembelajaran dan model penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang proses pembelajaran terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang model penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang proses pembelajaran dan model penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 pada guru di SMA Negeri 1 Polanharjo Tahun 2014.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pemahaman proses pembelajaran dan model penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran bagi guru tentang pentingnya pengaruh pemahaman proses belajar terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013 .
- b. Memberikan masukan kepada guru tentang pentingnya pemahaman model penilaian terhadap kesiapan dalam menerima Kurikulum 2013.